

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MITIGASI RISIKO BENCANA (STUDI BENDUNG CIHAMERANG DI KABUPATEN SUMEDANG)

Selvina Intan Budiman\* dan Engkus  
UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia  
Email: selvinaintanwork@gmail.com\*

### Riwayat Artikel

Diterima: 27 April 2026

Disetujui: 29 Mei 2026

Diterbitkan: 1 Juni 2026

### Abstract

*The purpose of this study was to determine how the government's disaster risk mitigation strategy was implemented at the Cihamerang Dam in Sumedang Regency and to identify the influencing variables. A qualitative, descriptive approach was used, using observation, interviews, and documentation techniques. The study findings indicate that policy implementation has not proceeded as smoothly as expected. This is evident in the lack of clear policy standards and objectives, the scarcity of resources, particularly financial resources, and poor coordination and communication between agencies. Furthermore, the worsening socioeconomic conditions of the affected communities have also impacted the success of policy implementation. In conclusion, there is still room for improvement in disaster risk reduction measures at the Cihamerang Dam, particularly in terms of clarity of policy direction, increased resources, and enhanced coordination and communication between agencies. In conclusion, there is still room for improvement in the Cihamerang Dam disaster risk reduction strategy, particularly in terms of increased inter-agency cooperation and communication, increased resources, and clarity of policy direction. In short, there is still room for improvement in the Cihamerang Dam disaster risk mitigation policy, particularly in the areas of clarity of policy direction, strengthening resources, and more responsive and effective stakeholder coordination and communication.*

**Keywords:** Policy Implementation, Disaster Risk Mitigation, Cihamerang Dam

### Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi pemerintah untuk mitigasi risiko bencana diimplementasikan di Bendungan Cihamerang di Kabupaten Sumedang dan untuk mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhinya. Melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi, pendekatan kualitatif dengan pendekatan deskriptif digunakan. Menurut temuan penelitian, implementasi kebijakan belum berjalan semulus yang seharusnya. Hal ini terlihat dari kurangnya standar dan tujuan kebijakan yang jelas, kelangkaan sumber daya, khususnya sumber daya keuangan, dan koordinasi serta komunikasi yang buruk antar instansi. Selain itu, kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terdampak yang memburuk juga berdampak pada keberhasilan implementasi kebijakan. Kesimpulannya, masih ada ruang untuk perbaikan dalam strategi pengurangan risiko bencana Bendungan Cihamerang, terutama dalam hal peningkatan kerja sama dan komunikasi antar lembaga, lebih banyak sumber daya, dan kejelasan arah kebijakan. Singkatnya, masih ada ruang untuk perbaikan dalam kebijakan mitigasi risiko bencana Bendungan Cihamerang, terutama di bidang kejelasan arah kebijakan, penguatan sumber daya, dan koordinasi serta komunikasi pemangku kepentingan agar lebih responsif dan efektif.

**Kata Kunci:** Implementasi Kebijakan, Mitigasi Risiko Bencana, Bendung Cihamerang

## A. LATAR BELAKANG

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu strategi utama pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan konektivitas antarwilayah. Namun, dalam implementasinya, pembangunan sering kali menimbulkan dampak lingkungan dan sosial apabila tidak diiringi dengan perencanaan mitigasi risiko yang memadai. Salah satu fenomena yang mencerminkan kondisi tersebut adalah Bendung Cihamerang di Kabupaten Sumedang yang muncul sebagai dampak dari pembangunan proyek Tol Cisumdawu.

Bendung ini terbentuk akibat aktivitas pembuangan material tanah (disposal) proyek yang menutup aliran sungai di kawasan Desa Sukasirnarasa, Kecamatan Rancakalong, sehingga menyebabkan genangan air yang luas menyerupai bendungan (Wijaya, 2025). Genangan tersebut berdampak langsung pada lahan pertanian warga, di mana sekitar 8 hektare sawah tidak lagi dapat digarap sehingga mengakibatkan hilangnya mata pencaharian masyarakat (Wijaya, 2025). Bahkan, kondisi ini telah berlangsung cukup lama, dengan sebagian lahan tidak dapat digunakan selama hampir lima tahun, sehingga memperparah kerugian ekonomi warga (Ardyan, 2026). Selain itu, keberadaan bendung ini juga menimbulkan risiko bencana lanjutan seperti potensi banjir, longsor, serta ancaman terhadap permukiman dan infrastruktur di sekitarnya (Wijaya, 2025).

Kejadian ini menunjukkan bahwa kekhawatiran terkait mitigasi bencana tidak hanya bersifat teknis tetapi juga sangat dipengaruhi oleh seberapa baik kebijakan pemerintah daerah diimplementasikan. Dari sudut pandang administrasi publik, efektivitas suatu kebijakan bergantung pada bagaimana kebijakan tersebut dirumuskan dan bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan dalam praktik. Oleh karena itu, studi ini menggunakan model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter & Van Horn dalam Agustino, (2020), yang mencakup enam variabel utama: komunikasi antar organisasi, standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, disposisi pelaksana, dan kondisi sosial, ekonomi, dan politik.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa implementasi kebijakan mitigasi bencana di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, meskipun secara normatif kebijakan telah dirumuskan dengan cukup baik. Penelitian oleh Nugraha et al., (2020) yang mengkaji implementasi kebijakan mitigasi bencana di Kabupaten Sumedang ditemukan bahwa meskipun implementasi kebijakan telah berjalan dengan sangat baik, namun masih belum optimal. Keterbatasan sumber daya dan koordinasi yang tidak memadai antar lembaga terkait merupakan beberapa tantangan yang dihadapi. Hasil ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan yang efektif tidak hanya bergantung pada keberadaan peraturan, tetapi juga pada kesiapan para pelaku pelaksana dan pendanaan yang memadai. Sejalan dengan itu, penelitian Sakti et al., (2020) mengenai program mitigasi berbasis masyarakat melalui Desa Tangguh Bencana menunjukkan bahwa upaya mitigasi telah dilakukan dengan melibatkan masyarakat, namun efektivitasnya masih bergantung pada tingkat kapasitas dan partisipasi masyarakat itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat sebagai pihak yang terdampak langsung oleh kebijakan mitigasi menentukan keberhasilan implementasinya di samping peran pemerintah. Selain itu, penelitian tentang implementasi kebijakan pengurangan risiko banjir di Kabupaten Bandung oleh Baihaqi & Kurniadi, (2023) menunjukkan bahwa kebijakan yang didukung oleh penyuluhan dan pengembangan infrastruktur dapat meningkatkan ketahanan daerah. Namun demikian, penelitian tersebut juga mengungkapkan bahwa koordinasi antar lembaga masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan kebijakan. Di sisi lain, penelitian Haeril et al., (2021) di Kabupaten Bima menunjukkan bahwa implementasi mitigasi bencana masih bersifat sporadis dan belum terintegrasi secara sistematis, sehingga kurang efektif dalam mengurangi risiko bencana.

Berdasarkan beberapa penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa keterlibatan masyarakat, kolaborasi antarlembaga, dan sumber daya merupakan hambatan utama dalam

implementasi kebijakan mitigasi bencana. Namun, hanya sedikit penelitian yang secara eksplisit mengkaji bagaimana pembangunan infrastruktur memengaruhi terciptanya risiko bencana baru. Sebaliknya, sebagian besar penelitian sebelumnya berfokus pada langkah-langkah mitigasi secara umum atau pada jenis bencana tertentu, seperti banjir. Selain itu, penelitian terdahulu cenderung lebih menitikberatkan pada perspektif pemerintah atau lembaga pelaksana kebijakan, sementara analisis terhadap dampak langsung yang dirasakan oleh masyarakat terdampak masih terbatas. Padahal, dalam konteks mitigasi bencana, masyarakat merupakan pihak yang paling merasakan konsekuensi dari keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan.

Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian, artinya masih relatif sedikit studi tentang penerapan langkah-langkah mitigasi risiko bencana yang disebabkan oleh pembangunan infrastruktur, khususnya yang berkaitan dengan bendungan atau banjir seperti Bendungan Cihamerang. Dengan demikian, penelitian ini menghadirkan kebaruan dengan menganalisis implementasi kebijakan mitigasi risiko bencana pada kasus spesifik Bendung Cihamerang di Kabupaten Sumedang, menggunakan pendekatan model Van Meter & Van Horn, serta mengintegrasikan analisis dari sisi pemerintah dan masyarakat terdampak secara lebih komprehensif. Penelitian ini juga menjadi yang pertama secara spesifik meneliti Bendung Cihamerang dalam perspektif administrasi publik, khususnya terkait implementasi kebijakan mitigasi risiko bencana.

Berdasarkan uraian di atas, isu utama dalam penelitian ini adalah penerapan kebijakan pemerintah untuk mitigasi risiko bencana yang tidak memadai di Bendungan Cihamerang, yang ditandai dengan dampak lingkungan yang berkelanjutan, ambiguitas seputar pengelolaan masyarakat, dan kemungkinan risiko bencana tambahan. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana kebijakan pemerintah untuk pengurangan risiko bencana diimplementasikan di Bendungan Cihamerang, menentukan elemen-elemen yang memengaruhi keberhasilan implementasi, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif. Adapun pertanyaan penelitian yang diajukan meliputi bagaimana implementasi kebijakan tersebut dijalankan, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya, dan bagaimana hal itu memengaruhi keadaan sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat setempat.

Studi ini penting dari sudut pandang akademis dan praktis. Secara akademis, diharapkan dapat meningkatkan penelitian di bidang administrasi publik, terutama di bidang mitigasi bencana dan implementasi kebijakan berdasarkan studi kasus empiris. Secara praktis, temuan studi ini diharapkan dapat mendukung manajemen pembangunan infrastruktur berkelanjutan yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat dan menawarkan penilaian serta pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menciptakan kebijakan mitigasi risiko bencana yang lebih efisien, responsif, dan terfokus.

## **B. KAJIAN PUSTAKA**

### **Implementasi Kebijakan Publik**

Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Menurut Ripley dan Franklin dalam Winarno, (2012) menyatakan bahwa "implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible*)". Selain itu, Grindle menyatakan dalam Winarno, (2012) bahwa "implementasi adalah membangun hubungan yang memfasilitasi realisasi tujuan kebijakan sebagai hasil dari kegiatan pemerintah." Selanjutnya menurut Van Meter & Van Horn dalam Subianto, (2020) implementasi adalah tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat, pemerintah, atau organisasi swasta dengan maksud untuk mencapai tujuan yang ditentukan dalam pilihan kebijakan.

## Mitigasi Risiko Bencana

Bencana didefinisikan sebagai kejadian atau rangkaian kejadian yang membahayakan dan mengganggu kehidupan dan mata pencaharian masyarakat, mengakibatkan kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, korban jiwa, dan dampak fisiologis akibat unsur alam dan buatan manusia. Strategi mitigasi bencana diperlukan untuk mengurangi dampak risiko bencana. (Nugraha et al., 2020) Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 6, mitigasi bencana adalah upaya untuk menurunkan risiko bencana melalui pembangunan fisik dan peningkatan kesadaran serta pembangunan kapasitas. Mitigasi bencana bertujuan untuk mengurangi risiko bencana, memberikan pedoman bagi pembangunan pemerintah, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya bencana, dan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang manajemen bencana (Fadhilah & Yuliani, 2024).

## Infrastruktur dan Risiko Lingkungan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, infrastruktur mengacu pada fasilitas umum dan infrastruktur. Fasilitas umum meliputi hal-hal seperti saluran telepon, jalan raya, jembatan, rumah sakit, dan fasilitas sanitasi. Infrastruktur adalah jenis modal publik yang diciptakan oleh investasi pemerintah, menurut ilmu ekonomi. Jalan raya, jembatan, dan sistem pembuangan limbah adalah contoh infrastruktur dalam konteks ini (Mankiw, 2003). Lingkungan eksternal yang memengaruhi tingkat operasional rantai pasokan merupakan sumber risiko lingkungan. Suatu organisasi atau seluruh rantai pasokan dapat terdampak oleh sejumlah kondisi lingkungan eksternal. Bencana alam, serangan teroris, penurunan ekonomi, kerusuhan politik, relokasi pabrik, dan masalah lingkungan lainnya adalah beberapa contoh risiko lingkungan (Prakash et al., 2017).

## C. METODE PENELITIAN

Berdasarkan berbagai masalah dan tujuan yang telah diuraikan, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dan teknik pemilihan informan menggunakan teknik *purposive sampling*, atau berdasarkan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2022). Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan aparatur desa, kepala dusun, dan masyarakat terdampak, juga melalui observasi di Kawasan Bendung Cihamerang Kabupaten Sumedang. Sementara data sekunder diperoleh dari studi dokumen website resmi kabupaten sumedang dan Dinas PUPR Kabupaten Sumedang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi (Sugiyono, 2022). Teknik analisis data menggunakan model analisis data menurut (Miles et al., 2014), yang memiliki tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan atau verifikasi. Untuk menguji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber, yang mencakup prosedur seperti reduksi data dan pengambilan kesimpulan, digunakan untuk memverifikasi keakuratan data yang dikumpulkan di lapangan. Model analisis implementasi kebijakan mengacu pada model Van Meter & Van Horn dalam Agustino, (2020), yang terdiri dari enam variabel utama, standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, disposisi pelaksana, komunikasi antar organisasi, dan kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Model ini digunakan untuk secara menyeluruh memeriksa elemen-elemen yang berdampak pada implementasi rencana mitigasi risiko bencana di Bendungan Cihamerang.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Data Dampak Bendung Cihamerang

No.	Kategori Dampak	Jumlah / Luas	Keterangan
1	Luas lahan	8,7725 Hektare	Lahan pertanian tergenang
2	Jumlah petani	63 Pemilik/penggarap	Kehilangan mata pencaharian

3	Jenis lahan	Sawah	Tidak dapat ditanami
4	Dampak utama	Genangan air	Bersifat permanen/ semi permanen
5	Potensi risiko	Banjir & longsor	Saat musim hujan
6	Kondisi ekonomi	Menurun	Pendapatan berkurang

Sumber: Data Terdampak Sesuai SPPT (2026)

### Standar Dan Sasaran Kebijakan

Kebijakan diperlukan untuk mengendalikan proses pencapaian tujuan organisasi (Aulia et al., 2024). Dalam kasus mitigasi bencana Bendung Cihamerang, pemerintah telah menetapkan langkah-langkah teknis seperti pengeringan bendungan dan penyedotan air sebagai upaya pengurangan risiko. Namun, implementasi di lapangan menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara standar formal dan pemahaman masyarakat. Temuan wawancara menunjukkan bahwa masyarakat masih mengalami kebingungan terkait arah kebijakan. Masyarakat A mengungkapkan: “Kami masih khawatir kalau sewaktu-waktu terjadi hal yang tidak diinginkan, karena belum tahu pasti sejauh mana kondisi bendungan ini aman.” (Wawancara, 25 April 2026), selain itu masyarakat B juga menyatakan: “Arahan pemerintah itu ada, tapi belum semuanya jelas. Kadang kami masih bingung harus bagaimana kalau terjadi keadaan darurat.” (Wawancara, 30 Mei 2026),

Temuan ini menunjukkan adanya ketidakjelasan dalam penerjemahan standar kebijakan ke tingkat masyarakat (*goal ambiguity*). Secara teoritis, model implementasi kebijakan Van Meter & Van Horn dalam Agustino, (2020) kejelasan standar dan tujuan kebijakan sangat penting untuk keberhasilan implementasi. Jika tujuan tidak dipahami oleh target kebijakan, maka implementasi akan mengalami hambatan. Selain itu, menurut Mazmanian & Sabatier, (1983) kejelasan tujuan menjadi syarat utama agar kebijakan dapat diimplementasikan secara konsisten oleh berbagai aktor. Dalam konteks ini, ketidakjelasan sasaran menyebabkan masyarakat tidak memiliki pedoman tindakan yang jelas dalam menghadapi potensi bencana. Implikasinya adalah meningkatnya kerentanan masyarakat karena kurangnya kesiapsiagaan berbasis pemahaman yang komprehensif.

### Sumber Daya

Dalam suatu proses implementasi program tentunya membutuhkan sumber daya, baik itu sumber daya manusia (SDM) maupun sumber daya non manusia misalnya finansial dan waktu. Keberhasilan proses implementasi program tersebut sangat tergantung dari sejauh mana ketersediaan sumber daya mampu mengalokasikan standar dan sasaran kebijakan. Jika sumber daya tidak memadai, pada akhirnya menyebabkan tidak berjalannya dengan baik implementasi kebijakan tersebut (Kusmaningtyas, 2009). Berdasarkan hasil temuan di lapangan dan hasil observasi serta wawancara, ditemukan bahwa sumber daya dalam implementasi kebijakan mitigasi bencana Bendung Cihamerang masih belum memadai, khususnya pada aspek sumber daya finansial.

Hal ini diperjelas oleh Aparatur Desa A yang menyatakan: “Kalau dari pemerintah desa jelas ini tidak akan bisa dianggarkan, karena ini mencapai biaya yang sangat besar” (Wawancara, 24 April 2026). Selain itu, ia juga menambahkan: “Untuk anggaran, pemerintah kabupaten pun belum bisa mengalokasikan, jadi dilimpahkan kepada pihak investor” (Wawancara, 24 April 2026). Dari sisi masyarakat, Masyarakat A menyampaikan bahwa bantuan yang diberikan pemerintah belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dan menutupi kerugian yang dialami (Wawancara, 25 April 2026).

Model Van Meter dan Van Horn dalam Agustino, (2020) menjelaskan bahwa keberhasilan kebijakan sangat dipengaruhi oleh kecukupan dan efektivitas sumber daya, dan menekankan bahwa tidak hanya jumlah sumber daya yang penting, tetapi juga distribusi dan pemanfaatannya secara optimal. Ketidakseimbangan ini menyebabkan implementasi menjadi

kurang efektif. Implikasinya adalah munculnya kesenjangan perlindungan di masyarakat, yang dapat meningkatkan risiko bencana pada kelompok tertentu.

### **Karakteristik Agen Pelaksana**

Sifat atau karakteristik para agen pelaksana (*stakeholders*) dalam hal ini adalah pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan Bendung Cihamerang, yaitu pemerintah desa, pemerintah daerah, serta pihak swasta yang memiliki tanggung jawab terhadap dampak yang ditimbulkan. Dalam pelaksanaan kebijakan mitigasi bencana ini, pemerintah desa berperan sebagai fasilitator yang menjembatani kebutuhan masyarakat dengan instansi terkait, seperti BPBD, Dinas PUTR, serta pihak perusahaan dan investor.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan dan hasil observasi serta wawancara, ditemukan bahwa agen pelaksana kebijakan telah menjalankan peran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, namun implementasi kebijakan melibatkan banyak aktor sehingga menimbulkan kompleksitas.

Hal ini dijelaskan oleh **Aparatur Desa A**: “Untuk pembagian tugas kami di pemerintah desa memfasilitasi data warga dan pertanahan, kepala desa sebagai pemangku kebijakan” (Wawancara, 24 April 2026). Sementara itu, dari sisi masyarakat, **Masyarakat B** menyampaikan: “Kadang respon dari pihak terkait agak lambat, terutama saat kondisi mulai mengkhawatirkan” (Wawancara, 30 Mei 2026). Hal ini menunjukkan adanya keterbatasan dalam fleksibilitas birokrasi. Secara teoritis, keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh kebijakan karakteristik organisasi pelaksana, terutama dalam hal struktur dan pola koordinasi. Implikasinya adalah keterlambatan dalam pengambilan keputusan yang dapat berdampak pada efektivitas mitigasi bencana.

### **Disposisi Pelaksana**

Menurut Sutmasa, (2021) disposisi atau kecenderungan agen pelaksana mengacu pada masing-masing dari lima komponen model implementasi kebijakan yang disaring melalui persepsi pelaksana tentang tanggung jawab dan komitmen terhadap implementasi kebijakan, mengikuti sikap yang menunjukkan ciri-ciri agen pelaksana. Ditemukan bahwa disposisi pelaksana dalam melaksanakan kebijakan mitigasi bencana Bendungan Cihamerang cukup baik, meskipun belum sepenuhnya ideal, berdasarkan hasil lapangan, observasi, dan wawancara yang membahas disposisi atau kecenderungan agen pelaksana.

Hal ini disampaikan oleh Aparatur Desa A: “Sikap dan komitmen, berkomitmen untuk mengedepankan kepentingan warga masyarakat” (Wawancara, 24 April 2026). Namun, dari sisi masyarakat, Masyarakat A menyatakan: “Responsif setelah viral” (Wawancara, 25 April 2026), dan masyarakat C juga menambahkan: “Seharusnya penanganan dilakukan lebih cepat sebelum masyarakat merasa khawatir.” (Wawancara, 30 Mei 2026). Secara teoritis, sikap pelaksana sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Disposisi yang kuat akan meningkatkan kepercayaan masyarakat, sedangkan disposisi yang lemah akan menimbulkan *distrust*. Implikasinya adalah munculnya ketidakpercayaan masyarakat yang dapat menghambat partisipasi dalam mitigasi bencana.

### **Komunikasi Antar Organisasi**

Klarifikasi standar atau indikator untuk kinerja kebijakan dan penyederhanaan aliran informasi dari berbagai sumber memerlukan komunikasi antar organisasi. Keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan akan bergantung pada seberapa baik organisasi yang menjalankan kebijakan tersebut berkomunikasi satu sama lain (Purnomo, 2018).

Berdasarkan observasi, wawancara, dan penelitian lapangan tentang variabel komunikasi antar organisasi, ditemukan bahwa meskipun koordinasi dan komunikasi antar lembaga pemerintah sedang berlangsung, namun masih belum sepenuhnya berhasil dalam menginformasikan publik. Hal ini disampaikan oleh **Aparatur Desa A**: “Untuk koordinasi kami tidak pernah berhenti berkoordinasi dengan BPBD, PUTR, BPWS” (Wawancara, 24 April 2026). Namun, dari sisi masyarakat, Masyarakat A menyampaikan bahwa informasi yang

diterima masih simpang siur, terutama terkait penanganan teknis di lapangan seperti penyedotan air (Wawancara, 25 April 2026). Secara teoritis, komunikasi kebijakan merupakan faktor penting dalam keberhasilan implementasi. Ketidakefektifan komunikasi dapat menyebabkan distorsi informasi dan menurunkan efektivitas kebijakan. Implikasinya sangat besar, terutama dalam konteks bencana, karena informasi yang tidak jelas dapat menyebabkan kesalahan tindakan masyarakat.

### **Kondisi Sosial, Ekonomi, Dan Politik**

Kondisi kondisi sosial, ekonomi, dan politik merupakan salah satu faktor pendukung yang perlu diperhatikan dalam implementasi kebijakan. Dalam hal ini, ketersediaan sumber daya keuangan sangat penting untuk pelaksanaan kebijakan yang efektif. Serupa dengan itu, karena kondisi sosial merupakan kelompok sasaran kebijakan publik, maka kondisi tersebut harus diperhitungkan saat menerapkan kebijakan (Akib, 2010). Ditemukan keadaan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat yang terdampak Bendungan Cihamerang memiliki dampak besar pada bagaimana kebijakan diterapkan, berdasarkan hasil penelitian lapangan, observasi, dan wawancara

Hal ini diungkapkan oleh Masyarakat A: “Kondisi saat ini sangat merugikan, dan takut ada bencana lanjutan” (Wawancara, 25 April 2026), masyarakat B juga menyatakan: “Aktivitas kami terganggu karena harus selalu waspada.” (Wawancara, 30 Mei 2026). Sementara itu, Aparatur Desa A menyatakan: “Masyarakat, semuanya dalam koordinasi bersama pemerintah desa” (Wawancara, 24 April 2026). Dari sisi sosial, masyarakat cenderung tetap kondusif dan mengikuti arahan pemerintah. Namun, dari sisi politik, terdapat indikasi bahwa respons pemerintah meningkat setelah permasalahan ini menjadi perhatian publik atau viral. Secara teoritis, kondisi sosial, ekonomi, dan politik merupakan faktor eksternal yang sangat mempengaruhi implementasi kebijakan. Implikasinya adalah kebijakan cenderung bersifat reaktif, bukan preventif, sehingga efektivitas mitigasi jangka panjang menjadi terbatas.

### **E. SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi kebijakan pemerintah dalam mitigasi risiko bencana di Bendung Cihamerang Kabupaten Sumedang belum berjalan optimal karena masih terdapat kendala pada kejelasan standar dan sasaran kebijakan, keterbatasan sumber daya, kompleksitas aktor pelaksana, lemahnya komunikasi publik, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat terdampak. Temuan ini menunjukkan bahwa mitigasi bencana akibat pembangunan infrastruktur tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah dalam menjalankan kebijakan secara jelas, responsif, terkoordinasi, dan mudah dipahami masyarakat. Dengan demikian, tujuan penelitian untuk menganalisis implementasi kebijakan mitigasi risiko bencana melalui model Van Meter dan Van Horn telah tercapai serta memberikan kontribusi pada kajian administrasi publik, khususnya dalam memahami pentingnya integrasi antara kebijakan, sumber daya, koordinasi, komunikasi, dan perlindungan sosial ekonomi masyarakat terdampak. Secara praktis, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait perlu memperjelas arah kebijakan, memperkuat alokasi anggaran, meningkatkan koordinasi antarinstansi, memperluas penyebaran informasi, serta melibatkan masyarakat dalam proses mitigasi agar kebijakan berjalan lebih efektif dan antisipatif. Penelitian ini masih terbatas pada satu lokus kasus dan pendekatan yang dominan deskriptif, sehingga penelitian selanjutnya disarankan menggunakan metode campuran, memperluas lokus pada kasus infrastruktur serupa, serta membandingkan perspektif pemerintah, masyarakat, dan aktor teknis untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif.

---

REFERENSI

---

- Agustino, L. (2020). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Akib, H. (2010). Implementasi kebijakan: apa, mengapa, dan bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*.
- Ardyan. (2026). *Kurangi Tekanan Air Bendung Cihamerang Sumedang, Penyedotan Terus Dilakukan*. Radar Bandung. <https://www.radarbandung.id/2026/03/06/kurangi-tekanan-air-bendung-cihamerang-sumedang-penyedotan-terus-dilakukan/>
- Aulia, R., Kurniawan, B., & Subhan, M. (2024). IMPLEMENTASI MANAJEMEN KEPEMIMPINAN DALAM PENCAPAIAN TUJUAN ORGANISASI. *Journal of Student Research*.
- Baihaqi, L. H., & Kurniadi, A. (2023). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA BANJIR PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DALAM RANGKA MENDUKUNG KETAHANAN WILAYAH. *JURNAL PAPTUNG*, 6(2).
- Fadhilah, P. Z., & Yuliani, F. (2024). Implementasi Mitigasi Penanggulangan Bencana Gempa Bumi di Kota Bukittinggi. *Journal of Research and Development on Public Policy*, 3(3), 199. <https://doi.org/10.58684/jarvic.v3i3.167>
- Haeril, Mas'ud, Irfadat, T., & Hendra. (2021). PENERAPAN KEBIJAKAN MITIGASI BENCANA (FISIK DAN NONFISIK) DALAM MENGURANGI RISIKO BENCANA DI KABUPATEN BIMA PENERAPAN KEBIJAKAN MITIGASI BENCANA (FISIK DAN NONFISIK) DALAM MENGURANGI RISIKO BENCANA DI KABUPATEN BIMA. *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*, 1.
- Kusmaningtyas, A. (2009). Pentingnya Pemilihan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Manusia Dalam Pencapaian Tujuan Organisasi. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Manajemen*.
- Mankiw, N. G. (2003). *Macroeconomics*. Worth Publishers.
- Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). *Implementation and Public Policy*. Bloomsbury Academic.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana Johnny. (2014). *Qualitative Data Analysis*. SAGE Publication.
- Nugraha, D. S., Setiawan, A., Prematuri Agningsih, D., Nurul Aprilianti, D., Sutisna, E., & Yuliani, L. (2020). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MITIGASI BENCANA PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG. *Journal of Regional Public Administration (JRPA)*, 5.
- Prakash, S., Soni, G., & Rathore, A. P. S. (2017). Risk analysis and mitigation for perishable food supply chain: a case of dairy industry. *Benchmarking: An International Journal*.
- Purnomo, A. (2018). Pelaksanaan Kebijakan Komunikasi Organisasi Pemerintahan Di Indonesia. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*.
- Sakti, P., Anwar, F., Adriadi, R., & Muhammadiyah Bengkulu, U. (2020). ANALISIS PENERAPAN PROGRAM MITIGASI BENCANA PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH. *JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration Silampari*, 2(1).
- Subianto, A. (2020). *KEBIJAKAN PUBLIK: Tinjauan Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi*. Brilliant.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Edisi 2)*. Alfabeta.
- Sutmasa, Y. G. (2021). Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*.
- Wijaya, P. S. (2025a). *Pengeringan Bendung Cihamerang Diawasi Ketat*. Sumedangkab.Go.Id. <https://sumedangkab.go.id/berita/detail/pengeringan-bendung-cihamerang-diawasi-ketat>

---

Wijaya, P. S. (2025b). *Pengeringan Bendung Cihamerang Terus Dipantau*.  
Sumedangkab.Go.Id. <https://sumedangkab.go.id/berita/detail/pengeringan-bendung-cihamerang-terus-dipantau>